



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024



Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259

Fax. (0231) 323685 Sumber

E-mail info@dprd-cirebonkab.go.id



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024



Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259

Fax. (0231) 323685 Sumber

E-mail info@dprd-cirebonkab.go.id



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR **57** TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 adalah:
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 adalah:
 - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 4

- (1) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.

(2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal **14 Agustus 2023**
BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 57 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Maksud Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 adalah :

- a. sebagai dokumen perencanaan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 adalah :
- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 4

- (1) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Uraian Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan Perencanaan Renja;
 - b. Pelaksanaan Renja; dan
 - c. Hasil Capaian Renja.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan pembangunan daerah;
 - b. Target dan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 - c. Target dan capaian indikator kinerja program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan pembangunan daerah;
 - d. Target dan capaian indikator kinerja kunci (IKK); dan
 - e. Target dan capaian indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja perangkat daerah dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja output, outcome dan sasaran strategis perangkat daerah dan kinerja perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja

Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.

- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penjabaran dari Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian Renstra, tujuan, sasaran dinas, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Renja.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator sub kegiatan pada Renja Tahun 2024 sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

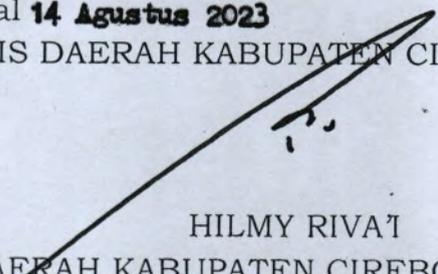
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal **14 Agustus 2023**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : ~~05162~~ /Kep.170-Setwan/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 3);
11. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.23-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal **16 Maret 2023**

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2 /Kep.170-Setwan/20 23

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

Penanggung jawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ketua Tim : Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Sekretaris Tim : Fungsional Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Kerja : a. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
1. Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda/Sub
Koordinator Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Muda
2. Fungsional Perancangan Peraturan
Perundang-undangan Ahli Muda/Sub
Koordinator Kajian Perundang-undangan
b. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
1. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub
Koordinator Fasilitasi Penganggaran
2. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub
Koordinator Fasilitasi Pengawasan
c. Bagian Humas, Protokol, Kerjasama dan Aspirasi
1. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda/Sub Koordinator Kerja Sama dan
Aspirasi
2. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda/Sub Koordinator Humas dan
Protokol
d. Bagian Umum dan Keuangan
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan
Daerah/Sub Koordinator Keuangan dan Aset

BUPATI CIREBON,



IMRON

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena atas kehendaknya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

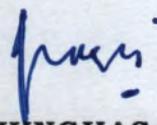
Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan tujuan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Penyusunan Renja ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami, mudah-mudahan Renja dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Sumber, Agustus 2023

Sekretaris DPRD

Kabupaten Cirebon,



ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.
NIP. 19650909 199303 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI CIREBON	
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON	
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIREBON	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.3. Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
4.1. Rencana Kerja	32
4.2. Pendanaan	35
BAB V PENUTUP	36
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	36
5.2. Kaidah-Kaidah	36
5.3. Rencana Tindak Lanjut	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	39

Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun (RPJPD), jangka menengah 5 (lima) tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 (satu) tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap perangkat daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 5 (lima) tahun untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Renstra perangkat daerah disusun dengan memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan RPJPD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra perangkat daerah tersebut, maka perangkat daerah harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. Guna menunjang visi Kabupaten Cirebon, yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN “.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai bentuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terpadu dan

terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja OPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja OPD harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perangkat daerah dalam menyusun Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Dalam penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Fungsi Renja OPD yang disusun setiap tahun yaitu sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sehingga terdapat keharmonisan pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan perangkat daerah, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang didalamnya mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Jangka waktu 1 (satu) Tahun. Proses atau

tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan musrenbang dari Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten
2. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2024 agar diselenggarakan secara simultan mulai dari musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah sampai musrenbang tingkat kabupaten.

Berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan tersebut, dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja), dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renja perangkat daerah merupakan suatu proses yang berjalan dan bertahap serta harus sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Disamping perencanaan secara *bottom up* dan juga *top down* juga seharusnya disesuaikan dengan arah kebijakan daerah, isu strategis dan kondisi sosial politik yang ada di daerah tersebut khususnya wilayah Kabupaten Cirebon.

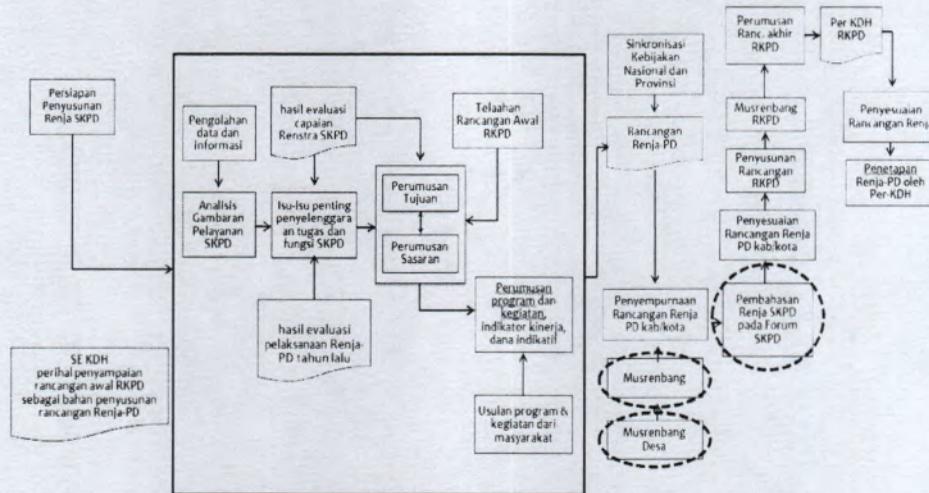
Setelah Renja ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Daerah, maka Rencana Kerja tersebut perlu untuk dijabarkan lebih rinci kedalam target program, kegiatan dan sub kegiatan. Di dalam rencana tahunan tersebut selanjutnya lebih terperinci lagi memuat target pada masing-masing sub kegiatan, hal tersebut dijadikan patokan dan dasar dalam pelaksanaan di masing-masing sub kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Bagan alur tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: (lihat gambar 1.1)

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten/Kota



Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 (RKPD).
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon selaras dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8);
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
 - 14) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);

- 15) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fungsi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 22);
- 16) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah untuk memasukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perangkat Daerah ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai Penyusunan Rencana Kerja (Renja), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : *Pendahuluan*, pada bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- BAB II : *Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu*, pada bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : *Tujuan dan Sasaran*, pada bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan.

BAB IV : *Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah*, pada bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

BAB V : *Penutup*, pada bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan kajian terhadap evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022, dengan demikian Rencana Kerja yang akan dilaksanakan akan lebih selektif, terarah, dan berkesinambungan dengan rencana setrategis Kabupaten Cirebon.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 bahwa kegiatan perencanaan pada seluruh kegiatan di Seketariat DPRD Kabupaten Cirebon yang disusun atas dasar keterpaduan antara sasaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitasi terhadap Fungsi DPRD, dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja.

Hasil capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja sasaran Sekretariat DPRD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran yang pertama adalah meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD, dengan indikator prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, sedangkan dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp.26.797.706.350,00 direalisasikan sebesar Rp.24.327.947.918,00 atau sebesar 90,78% dengan capaian kinerja 77,42%.
2. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD, dengan indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.55.797.929.277,00 direalisasikan sebesar Rp.54.313.487.367,00 atau sebesar 97,34% dengan capaian kinerja kegiatan 100,00%.

Untuk perkiraan target capaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2023 sesuai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Sasaran yang pertama adalah meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD, dengan indikator kinerja prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.277.292.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.11.582.838.837,00 atau sebesar 47,71% dengan capaian kinerja 5,38%.
2. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program, 9 (sembilan) kegiatan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.55.499.546.775,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.31.950.525.654,00 atau sebesar 57,57% dengan capaian kinerja 108,53%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian target kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon secara keseluruhan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	RUMUS/ PERHITUNGAN	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	(Jumlah Peraturan Perundangan yang ditetapkan / Jumlah Peraturan Perundangan yang diagendakan) x 100%	93%	77,42%	-
2.	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian Kinerja (20%) = 100 %	64.00 Poin	100,00%	-

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan fasilitasi terhadap fungsi DPRD dengan kategori yang baik.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selama beberapa waktu kedepan yang terdiri atas kondisi Internal dan eksternal sebagai berikut :

A. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

Manajemen Strategi memerlukan penilaian dan pencermatan lingkungan organisasi melalui proses analisis/pencermatan lingkungan organisasi, yaitu mengenai kondisi/situasi/keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi yang bersangkutan, yaitu berupa kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal.

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan (Strengths), berupa situasi dan kemampuan internal organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang bersifat positif dan memungkinkan organisasi memanfaatkan keuntungan strategi dalam mencapai visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah :

- 1). Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2). Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
- 3). Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai; dan
- 4). Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan (*Weakness*), berupa situasi faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang dapat menghambat organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menghambat pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Kelemahan yang dapat dilihat dalam tubuh Sekretariat DPRD yaitu:

- 1). Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
- 2). Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 3). Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia; dan
- 4). Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

B. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Oppoturnities*)

Peluang (*Opportunities*), berupa situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu

organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yaitu :

- 1). Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
- 2). Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- 3). Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
- 4). Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 5). Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

b. Tantangan / Ancaman (*Threats*)

Tantangan (*Threats*), Berupa faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menjadi penghambat bagi organisasi dalam pelaksanaan misi yang telah ditetapkan.

- 1). Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2). Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD; dan
- 3). Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Pilihan Langkah Strategis

a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Peluang (*Opportunities*)

- 1). Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi, optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli;

- 2). Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan / Ancaman (*Threats*)

- 1). Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
- 2). Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Oppoturnities*)

- 1). Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2). Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1). Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- 2). Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

D. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT / TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- b. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- c. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2024 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan

di daerah sebagaimana dapat dilihat lampiran dalam tabel di bawah ini :

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON

PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2024		PERKIRAAN MAJU PERENCANA TAHUN 2025	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			798.419.165		878.261.082
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	64.003.525	2 Dokumen	70.403.878
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	2 Dokumen	84.744.000	2 Dokumen	93.218.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Dokumen	649.671.640	3 Dokumen	714.638.804
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.112.220.176		5.623.442.194
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	30 Orang/Bulan	5.079.544.000	30 Orang/Bulan	5.587.498.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	16.338.088	1 Laporan	17.971.897
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	16.338.088	1 Laporan	17.971.897

1	2	3	4	5	6
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.563.956.944		1.720.352.638
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	413.408.600	1 Paket	454.749.460
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan</i>	10 Orang	1.150.548.344	10 Orang	1.265.603.178
Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.097.709.289		7.807.480.218
enyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket	366.934.206	11 Paket	403.627.627
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	2.410.036.646	20 Paket	2.651.040.311
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	131.853.917	2 Paket	145.039.309
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	8.000 Paket	1.437.746.200	8.000 Paket	1.581.520.820
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	20 Paket	577.272.374	20 Paket	634.999.611
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	8 Paket	247.512.841	8 Paket	272.264.125
Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	38 Paket	68.812.700	38 Paket	75.693.970
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	30 Laporan	1.857.540.405	30 Laporan	2.043.294.446
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	0 Unit	0	0 Unit	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.368.254.955		2.605.080.451
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	904.154.955	4 Laporan	994.570.451

1	2	3	4	5	6
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	18 Laporan	1.464.100.000	18 Laporan	1.610.510.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.098.146.811		5.607.961.492
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	19 Unit	895.071.678	19 Unit	984.578.846
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	28 Unit	813.701.526	28 Unit	895.071.679
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7 Unit	194.725.300	7 Unit	214.197.830
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi</i>	8 Unit	1.827.214.046	8 Unit	2.009.935.451
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8 Unit	1.367.434.261	8 Unit	1.504.177.687
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			40.747.272.480		44.821.999.728
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	50 Orang/Bulan	39.870.569.400	50 Orang/Bulan	43.857.626.340
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	6 Paket	733.660.510	6 Paket	807.026.561
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	50 Orang	143.042.570	50 Orang	157.346.827
Layanan Administrasi DPRD			5.049.206.689		5.554.127.358
Fasilitasi Fraksi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	84 Laporan	1.704.139.487	84 Laporan	1.874.553.436
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	38 Laporan	3.345.067.202	38 Laporan	3.679.573.922
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			20.862.847.236		22.949.131.960

1	2	3	4	5	6
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	12 Dokumen	5.235.063.000	12 Dokumen	5.758.569.300
Pembahasan Rancangan Perda	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	12 Dokumen	10.383.596.530	12 Dokumen	11.421.956.183
Penyelenggaraan Kajian PerundangUndangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undan an</i>	12 Dokumen	5.244.187.706	12 Dokumen	5.768.606.477
Pembahasan Kebijakan Anggaran			10.298.513.280		11.328.364.608
pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumla Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	2 Dokumen	4.090.748.640	2 Dokumen	4.499.823.504
Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	2 Dokumen	2.787.840.000	2 Dokumen	3.066.624.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab an APBD</i>	2 Dokumen	3.419.924.640	2 Dokumen	3.761.917.104
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			17486638758		19.235.302.634
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	12 Laporan	3.240.552.691	12 Laporan	3.564.607.960
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	12 Laporan	3.564.607.960	12 Laporan	3.921.068.756
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	12 Laporan	3.306.357.331	12 Laporan	3.636.993.064
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	12 Laporan	3.484.800.000	12 Laporan	3.833.280.000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	12 Dokumen	2.690.320.776	12 Dokumen	2.959.352.854
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah</i>	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.320.000.000

1	2	3	4	5	6
Peningkatan Kapasitas DPRD			13.793.430.497		15.172.773.547
Pendalaman Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	300 Dokumen	4.790.535.200	300 Dokumen	5.269.588.720
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	<i>umlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	396 Dokumen	4.110.765.682	396 Dokumen	4.521.842.250
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	25 Orang	2.740.101.749	25 Orang	3.014.111.924
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	20 Dokumen	1.915.661.316	20 Dokumen	2.107.227.448
Penyusunan Program Kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	1 Dokumen	236.366.550	1 Dokumen	260.003.205
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			9.550.141.590		10.505.155.749
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	1 Dokumen	169.400.000	1 Dokumen	186.340.000
Pelaksanaan Reses	<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	150 Dokumen	9.380.741.590	150 Dokumen	10.318.815.749
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			858.206.865		944.027.552
Penyusunan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	12 Laporan	858.206.865	12 Laporan	944.027.552
Fasilitasi Tugas DPRD			3.412.695.400		3.753.964.940
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	12 Dokumen	1.702.695.400	12 Dokumen	1.872.964.940
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	24 Dokumen	1.710.000.000	24 Dokumen	1.881.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top-down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah

hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum OPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum OPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan/sub kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasi oleh Bapelitbangda.

Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024, maka ditetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran

2024 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	Penyediaan Bahan/Material		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

1	2	3
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

1	2	3
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
		Penyusunan Tata Tertib DPRD
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Pembahasan APBD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
		Pengawasan Penggunaan Anggaran
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
		Penyusunan Program Kerja DPRD

1	2	3
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		Pelaksanaan Reses
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD
		Pengawasan Kode Etik DPRD
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan di daerah harus sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun ke lima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJPN 2000-2025 arahan untuk tahap keempat yaitu pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menetapkan tujuan yaitu “MENINGKATKAN SINERGITAS FASILITASI TERHADAP FUNGSI DPRD”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- (1). Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD
- (2). Meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Sinergitas Fasilitasi terhadap Fungsi DPRD Indikator : 1. Nilai IKM Dewan	1.1. Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	1.1.1. Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu
	1.2. Meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	1.2.1. Nilai LAKIP Sekretariat DPRD

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
7.	Penyediaan Bahan/Material	
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
I.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
I.9	Layanan Administrasi DPRD	
1.	Fasilitasi Fraksi DPRD	
2.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
II.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
1.	Pembahasan Rancangan Perda	
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	

1	2	3
II.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	
2.	Pembahasan APBD	
3.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
II.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
5.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
II.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	
1.	Pendalaman Tugas DPRD	
2.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
5.	Penyusunan Program Kerja DPRD	
6.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
II.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
1.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
2.	Pelaksanaan Reses	
II.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
1.	Pengawasan Kode Etik DPRD	
II.8	Fasilitasi Tugas DPRD	
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
2.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan, dengan rencana total anggaran sebesar **Rp.91.012.628.000,00** yang terdiri dari :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	63.757.096.500.00
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	571.684.300.00
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,586,000.00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33,283,800.00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	499,814,500.00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.769.268.300.00
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.738.714.000,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,308,000.00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,246,300.00
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.032.646.000.00
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36,451,800.00
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	996,194,200.00
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.027.856.300.00
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81,442,700.00

1	2	3
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,230,848,000.00
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27,232,700.00
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	787,600,000.00
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	385,837,400.00
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110,882,200.00
7.	Penyediaan Bahan/Material	68,772,900.00
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335,240,400.00
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.041.952.000.00
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	788,168,000.00
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,253,784,000.00
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.444.182.200.00
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	527,940,000.00
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173,916,000.00
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131,780,000.00
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	982,786,200.00
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	627,760,000.00

1	2	3
I.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	48.203.977.400.00
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	47.377.577.400.00
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	728,700,000.00
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	97,700,000.00
I.9	Layanan Administrasi DPRD	1.665.530.000.00
1.	Fasilitasi Fraksi DPRD	672,960,000.00
2.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	992,570,000.00
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.255.531.500.00
II.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.814.495.100.00
1.	Pembahasan Rancangan Perda	3,415,434,800.00
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1,399,060,300.00
II.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.057.614.900.00
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	379,417,300.00
2.	Pembahasan APBD	330,148,900.00
3.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	348,048,700.00
II.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.311.120.000.00
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1,545,832,400.00
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1,411,696,600.00
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1,391,903,600.00
4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1,318,677,600.00
5.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	643,009,800.00
II.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	7.796.915.900.00
1.	Pendalaman Tugas DPRD	2,514,932,600.00
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3,636,111,900.00
3.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1,314,000,000.00
4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	305,853,600.00
5.	Penyusunan Program Kerja DPRD	26,017,800.00

1	2	3
II.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.527.683.600.00
1.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	108,988,500.00
2.	Pelaksanaan Reses	4,418,695,100.00
II.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	300,884,500.00
1.	Pengawasan Kode Etik DPRD	300,884,500.00
II.7	Fasilitasi Tugas DPRD	2.446.817.500.00
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	865,756,000.00
2.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1,581,061,500.00

4.2. Pendanaan

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 yang merupakan alokasi Pagu Indikatif Sektoral (PIS) secara keseluruhan.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja merupakan acuan dan pedoman bagi Pimpinan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat fleksibel, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlangsung pada Tahun 2024 dengan harapan akan terwujudnya kesamaan pemahaman dan kesamaan pandangan serta kekompakan dalam mewujudkannya sehingga arah dan kebijakan pimpinan dapat terwujud untuk program kerja tahun 2024.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bagian dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi dan musyawarah antar pemangku kepentingan sehingga ada keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibuat serta dapat terintegrasi dengan baik. Namun demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dibuat tidak selamanya dapat dilaksanakan sesuai rencana mengingat keterbatasan waktu dan anggaran, untuk itu perlu adanya pemilihan skala prioritas kegiatan yang lebih penting sehingga pencapaian tujuan Sekretariat DPRD tetap berjalan optimal.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
- 2) Seluruh bagian berkewajiban menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Tahun 2024.

- 3) Seluruh bagian berkewajiban menjamin konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Tahun 2024.
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2024, Sekretariat DPRD berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat DPRD menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mendapat nilai penuh, niat atau rencana apapun belum cukup apalagi, tanpa perbuatan, untuk itu perlu adanya dukungan dari segenap jajaran aparat Sekretariat DPRD khususnya, dinas instansi terkait serta seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya.

Secara umum keberhasilan usaha-usaha pembangunan di sektor/bidang pelayanan umum, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam upaya meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada tujuan dan sasaran organisasi adalah :

- 1) Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- 2) Pembagian dan pemerataan tugas terhadap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pemberian insentif berdasarkan beban kerja.
- 4) Dalam rangka sinergitas, penyusunan rencana sub kegiatan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi, baik antar bagian maupun dengan OPD lain, agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan optimal dan efektif.

BUPATI CIREBON



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

- 3) Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pemberian insentif berdasarkan beban kerja.
- 4) Dalam rangka sinergitas, penyusunan rencana sub kegiatan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi, baik antar bagian maupun dengan OPD lain, agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan optimal dan efektif.

BUPATI CIREBON

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 telah diselenggarakan forum perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :
 - a. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 oleh Bapelitbangda Kabupaten Cirebon
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum perangkat daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh pemateri, maka pada :

Hari dan tanggal : Senin/13 Februari 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD

Forum Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 :

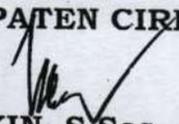
MENYEPAKATI

- KESATU : Prioritas Daerah yang diampuh oleh Sekretariat DPRD yaitu Reformasi Birokrasi melalui Optimalisasi Pelayanan Publik yang Prima
- KEDUA : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD merupakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD
- KETIGA : Pemilahan Daftar Skala Prioritas untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD
- KEEMPAT : Pagu Indikatf Sektoral (PIS) Sekretariat DPRD belum ditetapkan
- KELIMA : Jadwal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, Februari 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIREBON**

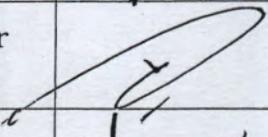
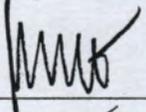
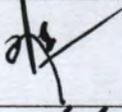
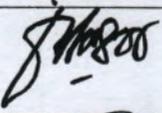
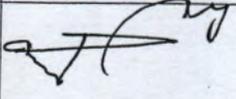

IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19660420 199602 1 001

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL : 13 Februari 2023

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

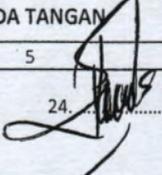
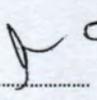
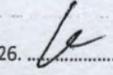
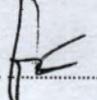
NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Ikin Asikin, S.Sos., M.Si.	Sekretariat DPRD	Sumber	
2.	Drs. Raden Chaidir Susilaningrat	Sekretariat DPRD	Sumber	
3.	Wawan Siswandar, SE., M.Si	Sekretariat DPRD	Sumber	
4.	Dr. Nanang Ruhyana, SKM., M.H.	Sekretariat DPRD	Sumber	
5.	Ir. Fitri Nurliasari, MP.	Unsur BAPPELITBANGDA	Sumber	
6.	Rahmat Arifudin, S.Si., M.Sc, MT.	Unsur BAPPELITBANGDA	Sumber	

DAFTAR HADIR
FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON

Hari : Senin

Tanggal : 13 Februari 2023

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	1.
2	Ir. FITRI NURLIASARI, MP.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	2.
3	DWI KUSUMAYANTI, SKM., M.K.M.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	3.
4	YUSA INDERAPERMANA, S.T., M.T.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	4.
5	RAHMAT ARIFUDDIN, S.Si., M.Sc., M.T.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	5.
6	OPI, S.T.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tenaga Ahli Aplikasi E-Perencanaan	6.
7	Drs. RADEN CHAIDIR SUSILANINGRAT	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Humas, Protckol, Kerja Sama dan Aspirasi Sekretariat DPRD	7.
8	WAWAN SISWANDAR, SE, M.Si.	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	8.
9	Dr. NANANG RUHYANA, SKM., M.H.	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD	9.
10	Hj. NISA AFIDAH, SH.	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekre:ariat DPRD	10.
11	Dra. PUTI AMANAH SARI	Sekretariat DPRD		11.
12	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	Sekretariat DPRD		12.
13	ANTO SUGIANTO, SE.	Sekretariat DPRD		13.
14	OJI SAROJI, ST., M.A.P	Sekretariat DPRD		14.
15	HARYANTO, SH.	Sekretariat DPRD		15.
16	WIWIN WINARTI, S.IP.	Sekretariat DPRD		16.
17	NANI MARYANI, S.Sos.	Sekretariat DPRD	AKPPD	17.
18	RAMDANI, S.T.	Sekretariat DPRD		18.
19	WATMA, SE.	Sekretariat DPRD		19.
20	DIDING RUHANDI	Sekretariat DPRD	Penyelola Keuangan	20.
21	SUTA, SE.	Sekretariat DPRD	Penyelola Keuangan	21.
22	IBA SUARA	Sekretariat DPRD		22.
23	RUSTANDI, S.AP.	Sekretariat DPRD		23.

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
24	AAN KURNIA	Sekretariat DPRD	Pengelola Keuangan	24. 
25	SISKA AMALIAH, A.Md.	Sekretariat DPRD		25. 
26	JANIRA, S.E.	Sekretariat DPRD		26. 
27	RADIMA	Sekretariat DPRD		27. 
28	TAYU	Sekretariat DPRD		28. 
29	MISJAYA	Sekretariat DPRD		29. 
30	IIS ISKANDAR	Sekretariat DPRD	Pengelola persidua	30. 

Sumber, 13 Februari 2023
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



RAMDANI, S.T.

NIP. 19790807 201001 1 010

**BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN RENJA ... SEKRETARIAT DPRD**

Nomor : 027.124/234

Pada Hari **SENIN** Tanggal **20** Bulan **PEBUARI** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di **SEKRETARIAT DPRD**, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis untuk melakukan verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka penyelarasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi yang disampaikan melalui desk oleh masing-masing Perangkat Daerah, maka pada :

Hari dan Tanggal : **SENIN** , **20** **PEB** 2023
J a m : **12:00** WIB s/d selesai
Tempat : **RUANG RAPAT SEKRETARIAT DPRD**

seluruh peserta rapat

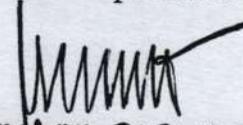
MENYEPAKATI

- KESATU** : Hasil pembahasan desk verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEDUA** : Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- KETIGA** : Hasil pembahasan tersebut merupakan saran dan rekomendasi untuk dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, Tanggal **20** **pebruari** 2023

.....
Selaku Pimpinan Rapat,


WAWAN SISWANDAR
NIP. **197405061994031003**

LAMPIRAN I: BERITA ACARA

BAPPELITBANGDA

KABUPATEN CIREBON

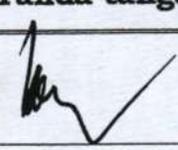
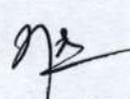
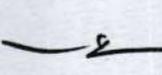
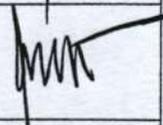
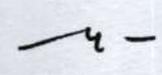
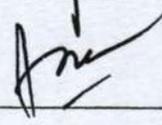
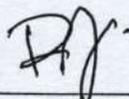
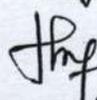
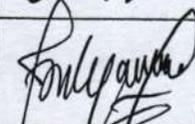
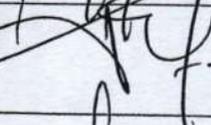
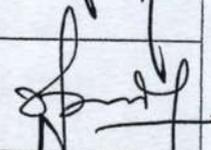
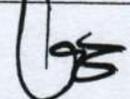
NOMOR : 027.124/234

TANGGAL : 20 Februari 2023

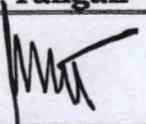
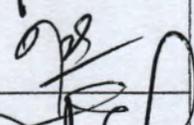
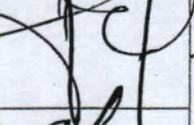
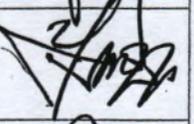
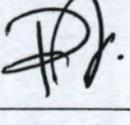
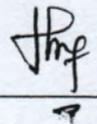
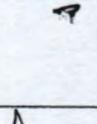
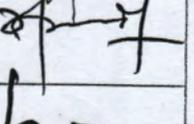
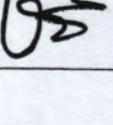
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT KOORDINASI TEKNIS VERIFIKASI RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DPRD.....

Tanggal : 20 Februari 2023

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat DPRD

No	Nama	Perangkat Daerah	Jabatan	Tanda tangan
1.	IKIN ASIKIN	Setwan	Setwan	
2.	Narang Rulmyana	Setwan	Kabag Fasilitasi	
3.	NANJAN SISUWADAR		Kab. Umum & KEUTARA	
4.	NISA AFIDAH		Kb Persida Pe UU	
5.	Raudani	Setwan	F. Perene.	
6.	Wiwim Winarti	Setwan	Keb Unpeg	
	Aji Suroji	Setwan	Kesub ker	
	Pukti Anwarah Sari	Setwan	Panitia Humas	
	HARYANTO		Panitia	
	Harshi tfo p		Panitia Humas	
	lie ISKANDAR	Setwan	Perenda	

Mewakili Peserta Rapat Koordinasi Teknis Verifikasi Rancangan Renja : SEKRETARAT
DPRD KAB. CIREBON

No.	Nama	Perangkat Daerah	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WAWATI SISWANDAR	Setwan	Kabag Umum & Berhubungan	
2.	Narasang Rukhyana	Setwan	Kabag Fasilitasi	
3.	HARZANTO	Setwan	Seksi. PAS	
4.	Aji Sunaji	Setwan	Kesekret.	
5.	Raudani	Setwan	Fungsional Jec	
6.	Wiwim Wenarti	Setwan	Kab Umeg	
	Aji Sunaji	Setwan	Kesekret.	
	Putri Anwarah Sari	Setwan	Pramata Humas	
	Hardi F. S. P.	Setwan	Pramata Humas	
	Ica Iskandar	Setwan	Presidu	

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		✓		
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			13 Feb 2023
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian	✓			

**LAMPIRAN II : BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
TEKNIS VERIFIKASI RANCANGAN
RENJA**

NOMOR : 021.124/234

TANGGAL : 20 Februari 2023

MATRIKS PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			DRAFT
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			

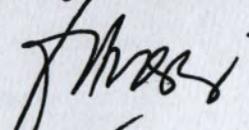
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	✓			

Mengetahui,

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABUPATEN CIREBON

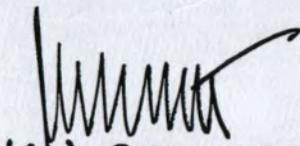
KABID LITBANG


FITRI PURLIA SARI
 NIP. 196812141994032006

Cirebon, Tanggal 20 Februari 2023

KEPALA Bagian Umum dan Keuangan

KABUPATEN CIREBON


WAWAN SISWANDARA
 NIP. 197406051981031003

**LAMPIRAN III : BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
TEKNIS VERIFIKASI RANCANGAN
RENJA**
 NOMOR : 027.124 / 234
 TANGGAL : 20 Februari 2023

KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Mengacu pada : 1. Prosentase Juml. peraturan perundangan selesai tepat waktu 2. Nilai LAKIP sekretariat DPRD.
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Perumusan rencana prog. dan keg. prioritas : 1. Prog. Renjang urusan pemerintahan daerah kota/kab 2. Prog. Drkvingan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Cirebon, tanggal 20 Februari 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABUPATEN CIREBON

KABID LITBANG

[Signature]
 FITRI NURLITA SARI
 NIP. 196811214199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN SUB KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2022

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	0.00.01.2. 01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.114.700		24.661.700	87.72 ✓	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Kumulatif)	3 Dok	1	3	100 ✓		
2	0.00.01.2. 01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	41.369.300	6.114.000	27.074.700	65.45 ✓	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Dokumen Perencanaan RKA SKPD yang disusun (Kumulatif)	1 Dok		1	100 ✓		
3	0.00.01.2. 01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.796.100	27.513.048	412.933.388	91.60 ✓	RAMDANI, S.T.	
		umlah laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan SPJ Keuangan yang disusun (Kumulatif)	3 Dok	0.12	3	100 ✓		
4	0.00.01.2. 02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.959.382.500	3.669.062.002	43.261.898.229	98.41 ✓	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan (Non Kumulatif)	80 Pegawai	80	80	100 ✓		
5	0.00.01.2. 02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.514.000		5.776.000	76.87 ✓	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun (Kumulatif)	1 Dok		1	100 ✓		
6	0.00.01.2. 02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.485.000		7.163.000	95.70 ✓	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun (Kumulatif)	1 Dok		1	100 ✓		
7	0.00.01.2. 05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.755.565		36.747.700	99.98 ✓	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Kumulatif)	120 Stel		120	100 ✓		
8	0.00.01.2. 05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	781.395.000	127.989.399	654.411.654	83.75 ✓	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti (Kumulatif)	6 Dok	1	6	100 ✓		
9	0.00.01.2. 06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.716.400	59.260.900	140.716.400	100 ✓	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Kumulatif)	11 Dok	0.68	11	100 ✓		
10	0.00.01.2. 06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.647.641.500	49.302.000	1.614.532.340	97.99 ✓	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan (Kumulatif)	20 Jenis		20	100 ✓		
11	0.00.01.2. 06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.277.200	29.931.000	51.166.200	71.78 ✓	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan (Kumulatif)	16 Dok		16	100 ✓		
12	0.00.01.2. 06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	772.800.000	62.150.000	699.000.000	90.45 ✓	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan (Kumulatif)	8000 Dok		8000	100 ✓		
13	0.00.01.2. 06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.995.500	76.865.036	331.461.583	93.11 ✓	WIWIN WINARTI, S.IP.	

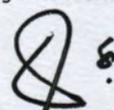
No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Kumulatif)	18 Dok	0.08	17.53	97.39		
14	0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	156.150.000	5.974.512	125.160.144	80.15	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan. (Kumulatif)	8 Dok	0.39	8	100		
15	0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	30.380.400	4.843.200	30.375.600	99.98	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah ATK yang disediakan (Kumulatif)	14 Paket	0.82	14	100		
16	0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.012.000	32.036.080	246.673.504	75.90	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (Kumulatif)	70 Dok		70	100		
17	0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	703.826.312	59.917.744	670.125.348	95.21	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah rekening telekomunikasi, air, listrik yang dibayarkan (Kumulatif)	4 Dok	0.37	4	100		
18	0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	839.670.000	190.720.000	817.937.653	97.41	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor (Kumulatif)	18 Dok	4.50	18	100		
19	0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	398.936.000	55.333.048	378.691.576	94.93	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kumulatif)	19 Dok	1.42	16.85	88.68		
20	0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.437.000	6.426.024	183.212.088	92.80	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diurus perijizinan (Kumulatif)	28 Dok		28	100		
21	0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.000.000	42.102.500	121.665.500	83.91	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Kumulatif)	7 Dok		7	100		
22	0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.507.606.700	213.471.662	1.474.830.465	97.83	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Kumulatif)	8 Dok	0.25	8	100		
23	0.00.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.014.443.600	185.155.498	943.601.503	93.02	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Rumah Jabatan yang Terpelihara (Kumulatif)	8 Dok		8	100		
24	0.00.01.2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	525.500.000	286.125.000	516.749.500	98.33	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang diadakan (Kumulatif)	200 Stel	100	200	100		
25	0.00.01.2.15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	97.700.000	37.504.000	37.504.000	38.39	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Jasa jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Kumulatif)	50 Dok	32	32	64		
26	0.00.01.2.16.02.	Fasilitasi Fraksi DPRD	698.515.900	56.645.548	683.868.776	97.90	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan hasil rapat-rapat Fraksi (Kumulatif)	84 Dok	7	84	100		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	0.00.01.2. 16.03.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	856.508.600	26.395.068	815.548.816	95,22	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD (Kumulatif)	38 Dok	10	36	94.74		
28	4.02.02.2. 01.02.	Pembahasan Rancangan Perda	3.551.397.150	1.060.915.145	3.107.724.498	87.51	ANTO SUGIANTO, SE.; Hj. NISA AFIDAH, SH.	
		Jumlah Rancangan Perda (Raperda) yang dibahas (Kumulatif)	12 Dok		12	100		
29	4.02.02.2. 01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.504.157.900	354.901.111	1.032.354.548	68.63	ANTO SUGIANTO, SE.; Hj. NISA AFIDAH, SH.	
		Jumlah Pra Rancangan Perda yang dibahas (Kumulatif)	12 Dok		12	100		
30	4.02.02.2. 02.01.	pembahasan KUA dan PPAS	547.113.600	3.106.200	388.982.698	71,10	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah KUA dan PPAS yang dibahas (Kumulatif)	2 Dok		2	100		
31	4.02.02.2. 02.03.	Pembahasan APBD	315.130.100	24.388.300	251.868.310	79.93	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah APBD yang Dibahas (Kumulatif)	2 Dok		2	100		
32	4.02.02.2. 02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	399.174.100	10.886.767	369.552.142	92.58	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas (Kumulatif)	2 Dok		2	100		
33	4.02.02.2. 03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.074.931.200	113.753.755	1.009.804.548	93.94	HARYANTO, S.H.; HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kumulatif)	12 Dok	1	12	100		
34	4.02.02.2. 03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.190.923.200	109.545.341	1.056.072.478	88.68	HARYANTO, S.H.; HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Infrastruktur (Kumulatif)	12 Dok	1	12	100		
35	4.02.02.2. 03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.152.412.800	115.332.086	1.102.048.277	95.63	HARYANTO, S.H.; HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kumulatif)	12 Dok	1	12	100		
36	4.02.02.2. 03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.074.863.900	123.969.342	1.000.383.111	93.07	HARYANTO, S.H.; HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian (Kumulatif)	12 Dok	1	12	100		
37	4.02.02.2. 03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	496.751.000	176.725.000	463.019.247	93.21	HARYANTO, S.H.; HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran (Kumulatif)	12 Dok	1	12	100		
38	4.02.02.2. 04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	2.666.054.500	36.468.314	2.182.453.303	81.86	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Peserta, pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas (Kumulatif)	300 Dok		300	100		
39	4.02.02.2. 04.03.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.373.098.200	397.572.934	3.301.569.308	97.88	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah kegiatankegiatan DPRD yang dipublikasikan (Kumulatif)	396 Kegiatan		396	100		
40	4.02.02.2. 04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.414.000.000	180.750.000	1.126.250.000	79.65	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan (Kumulatif)	18 Orang	0.76	18	100		

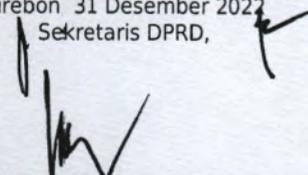
No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	4.02.02.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	382.501.600	23.160.000	363.168.000	94.95 ✓	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Kumulatif)	20 Dok		20	100 ✓		
42	4.02.02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	5.846.509.400	40.564.700	5.769.132.200	98.68 ✓	Dra. PUTI AMANAH SARI	
		Jumlah Laporan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD (Kumulatif)	150 Laporan		150	100 ✓		
43	4.02.02.2.06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	255.214.400	8.470.311	250.825.669	98.28 ✓	HARYANTO, S.H.; HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Rapat Badan Kehormatan DPR (Kumulatif)	12 Dok	1	12	100 ✓		
44	4.02.02.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.553.473.300	54.501.800	1.552.739.581	99.95 ✓	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah Laporan hasil kunjungan kerja DPRD ke luar daerah (Kumulatif)	64 Dok		64	100 ✓		

Jumlah Serapan Anggaran (BL) Bulan ini : **Rp. 8.145.848.375,00**

Yang memverifikasi,


DWI KUSUMAYANTI, S.K.M., M.K.M
 NIP. 19710118 199503 2 002

Cirebon 31 Desember 2022
 Sekretaris DPRD,


IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19660420 199602 1 001

Catatan Hasil Evaluasi : _____

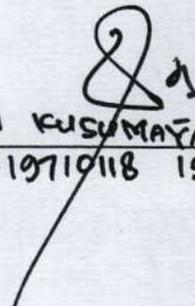


PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN PROGRAM
SEKRETARIAT DPRD
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2022

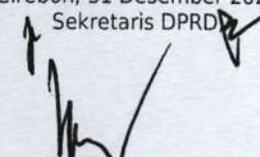
No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.797.929.277	5.310.837.269	54.313.487.367	97.34	Drs. H. SUCIPTO, MM.; Hj. NISA AFIDAH, SH.; WAWAN SISWANDAR, SE, M.Si.	
		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Non Kumulatif)	96 Prosen	96	96	100		
		Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (Non Kumulatif)	96 Prosen	96	96	100		
		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen					
		Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan (Non Kumulatif)	96 Prosen	96	96	100		
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD (Non Kumulatif)	96 Prosen	96	96	100		
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif (Non Kumulatif)	100 Prosen	100	100	100		
		Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100	100	100		
2	4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.797.706.350	2.835.011.106	24.327.947.918	90.78	ASEP SUTANDI, SE, M.Si.; Dr. NANANG RUHYANA, SKM., M.H.; Drs. H. SUCIPTO, MM.; Drs. RADEN CHAIDIR SUSILANINGRAT; Hj. NISA AFIDAH, SH.; WAWAN SISWANDAR, SE, M.Si.	
		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen	90	90	96.77		

Jumlah Serapan Anggaran (BL) Bulan ini : **Rp. 8.145.848.375,00**

Yang memverifikasi,


DWI KUSUMAYANTI, S.K.M., M.KM
 NIP. 19710118 199503 2 002

Cirebon, 31 Desember 2022
 Sekretaris DPRD


IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19660420 199602 1 001

Catatan Hasil Evaluasi : _____



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD (IKK/IKU)
SEKRETARIAT DPRD
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2022

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4.1.01.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	26.797.706.350	2.835.011.106	24.327.947.918	90.78	✓
		(IKK/IKU) Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen	72.000	72.000	77.42	✓
2	4.1.02.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	55.797.929.277	5.310.837.269	54.313.487.367	97.34	✓
		(IKK/IKU) Nilai LAKIP Sekretariat DPRD (Non Kumulatif)	64 Poin	64.000	64.000	100	✓

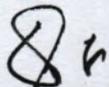
Jumlah Serapan Anggaran (BL) Bulan ini : **Rp. 8.145.848.375,00**

Telah diverifikasi

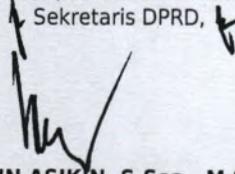
Pada tanggal: ____/____/2022

Nomor BA : 057/____/XII-PDE/2022

a.n Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon
Verifikator,


DWI KUSUMAYANTI, S.K.M., M.K.M
NIP. 19710118 199503 2 002

Cirebon, 31 Desember 2022

Sekretaris DPRD, 

IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660420 199602 1 001

Catatan Evaluasi:

Faktor Pendorong Keberhasilan:

Faktor Penghambat Pencapaian:

Tindak Lanjut yang diperlukan:



**CAPAIAN IKU/IKK
SEKRETARIAT DPRD
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2022**

No	URAIAN	JUMLAH		
		TARGET	CAPAIAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase Jumlah Feraturan Perundangan selesai tepat waktu	93,00 Prosen	72,00	77,42
2	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	64,00 Poin	64,00	100,00

Diverifikasi pada tanggal: 09/01/2023
Nomor Verifikasi: 057/16/XII-PDE/2022



**a.n BUPATI CIREBON
Sekretaris DPRD**

IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP 19660420 199602 1 001

LEMBAR REKONSILIASI BELANJA

SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Bulan Desember Tahun 2022

URAIAN	BUD			SKPD			SELISIH		
	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini
SP2D Belanja Gaji & Tunjangan	39.596.081.527,00	3.669.062.005,00	43.265.143.532,00	39.596.081.527,00	3.669.062.005,00	43.265.143.532,00	0,00	0,00	0,00
STS Belanja Gaji & Tunjangan	3.245.300,00	3,00	3.245.303,00	3.245.300,00	3,00	3.245.303,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Gaji & Tunjangan	39.592.836.227,00	3.669.062.002,00	43.261.898.229,00	39.592.836.227,00	3.669.062.002,00	43.261.898.229,00	0,00	0,00	0,00
SP2D Belanja Langsung	3.776.179.059,00	978.792.141,00	4.754.971.200,00	3.776.179.059,00	978.792.141,00	4.754.971.200,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Langsung	3.776.179.059,00	978.792.141,00	4.754.971.200,00	3.776.179.059,00	978.792.141,00	4.754.971.200,00	0,00	0,00	0,00
SP2D UP dan GU	24.240.700.474,00	2.891.954.850,00	27.132.655.324,00	24.240.700.474,00	2.891.954.850,00	27.132.655.324,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Belanja UP/GU	23.632.655.324,00	3.497.994.232,00	27.130.649.556,00	23.632.655.324,00	3.497.994.232,00	27.130.649.556,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian UP	0,00	2.005.768,00	2.005.768,00	0,00	2.005.768,00	2.005.768,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Koreksi Belanja UP/GU	57.712.800,00	0,00	57.712.800,00	57.712.800,00	0,00	57.712.800,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja UP/GU	23.574.942.524,00	3.497.994.232,00	27.072.936.756,00	23.574.942.524,00	3.497.994.232,00	27.072.936.756,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Kas Belanja UP/GU	665.757.950,00	-608.045.150,00	57.712.800,00	665.757.950,00	-608.045.150,00	57.712.800,00	0,00	0,00	0,00
SP2D Tambahan Uang (TU)	3.612.243.400,00	0,00	3.612.243.400,00	3.612.243.400,00	0,00	3.612.243.400,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Belanja Tambahan Uang (TU)	3.551.629.100,00	0,00	3.551.629.100,00	3.551.629.100,00	0,00	3.551.629.100,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian TU	31.929.700,00	28.684.600,00	60.614.300,00	31.929.700,00	28.684.600,00	60.614.300,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Kas Belanja TU	28.684.600,00	-28.684.600,00	0,00	28.684.600,00	-28.684.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REALISASI BELANJA	70.495.586.910,00	8.145.848.375,00	78.641.435.285,00	70.495.586.910,00	8.145.848.375,00	78.641.435.285,00	0,00	0,00	0,00
SISA KAS DARI BELANJA UP/GU dan TU	636.729.750,00	-636.729.750,00	0,00	636.729.750,00	-636.729.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	BUD			SKPD			SELISIH		
	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini
PERHITUNGAN SALDO KAS DI BENDAHARA									
Saldo Tunai				0,00	0,00	0,00			
Saldo Bank				0,00	0,00	0,00			
PERHITUNGAN PAJAK (UP / GU / TU)									
Perimaan				1.035.969.389,00	174.370.176,00	1.210.339.565,00			
Penyetoran				913.126.185,00	297.213.380,00	1.210.339.565,00			
Saldo Pajak				122.843.204,00	-122.843.204,00	0,00			

Catatan :

Terdapat Boban Utang sebesar Rp.39.033.041,00 terdiri dari Utang Belanja Listrik Rp.31.320.621,00 Utang Belanja Air Rp.6.772.790,00 dan Utang Belanja Telepon Rp.939.630,00

Sumber, 3 Januari 2023
Kepala Sub Bidang Belanja Daerah



Handwritten signature of Johar Maknun, SAP.

JOHAR MAKNUN, SAP.
NIP. 19711212 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2022

Indikator dan target kinerja yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD 93 Prosen
2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD 64 Poin

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13=6+12			14=13/5x100%
0.00.	NON BIDANG URUSAN																							
0.00.01.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	96	107.580.577.239	95	5.794.996.600	96	6.696.193.812	44.07	938.849.620	81.05	2.107.946.532	95.84	4.191.068.887	96	6.264.070.364	96	6.264.070.364	96	12.059.066.964	100	11.21	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN; BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
			Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	96	45.440.296.928	95	4.473.550.995	96	3.263.423.300	23.56	524.982.406	54.87	1.075.283.989	84.63	2.179.042.673	96	3.102.001.132	96	3.102.001.132	96	7.575.552.127	100	16.67	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	94	273.533.925	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD		Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	96	6.277.806.210	100	534.410.000	96	562.255.565	0	0	29.41	121.012.000	68.75	267.372.200	96	553.497.200	96	553.497.200	100	1.087.907.200	104.17	17.33	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
			Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	96	186.333.880.704	95	43.931.884.199	96	44.740.777.500	2.78	10.353.636.817	29.44	22.111.511.996	53.33	32.636.568.193	96	43.916.309.883	96	43.916.309.883	96	87.848.194.082	100	47.15	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN; SEKRETARIAT DPRD
			Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	3.505.830.697	100	344.674.300	100	465.795.100	65	101.517.344	70	212.967.359	95	326.498.244	100	425.872.388	100	425.872.388	100	770.546.688	100	21.98	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
			Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	786.816.580	100	48.717.879	100	69.484.000	0	11.650.000	12.50	21.156.100	12.50	25.020.100	100	51.736.400	100	51.736.400	100	100.454.279	100	12.77	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	1.424.541.628	1	113.527.459	1	520.280.100	0	107.391.344	0	228.347.459	0	338.579.344	0	464.669.788	0	464.669.788	0	849.743.967	0	59.65	
0.00.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	6	89.427.050	3	3.793.500	3	28.114.700	0	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	3	24.661.700	3	24.661.700	3	28.455.200	50	31.82	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA SKPD yang disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	4	169.488.000	0	25.113.989	1	41.369.300	0	0	0.50	9.506.100	0.50	13.370.100	1	27.074.700	1	27.074.700	1	52.188.689	25	30.79	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan RKA SKPD yang disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	2	42.372.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA SKPD yang disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	1	21.186.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan DPA SKPD yang disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	1	21.186.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan SPJ Keuangan yang disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	5	996.138.578	0.24	84.619.970	3	450.796.100	2.24	95.741.344	2.48	207.191.359	2.72	313.559.244	3	412.933.388	3	412.933.388	3	497.553.358	60	49.95	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	4	84.744.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	91.322.750.400	1	43.352.639.901	1	43.974.381.500	0	10.200.921.983	0	21.765.736.185	0	32.209.119.738	0	43.274.837.229	0	43.274.837.229	0	86.635.795.130	0	94.87	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
0.00.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulan, (Satuan: Pegawai - Non Kumulatif)	39	91.282.300.520	82	43.352.639.901	80	43.959.382.500	39	10.195.145.983	39	21.759.960.185	80	32.196.180.738	80	43.261.898.229	80	43.261.898.229	80	86.614.538.130	205.13	94.89	SEKRETARIAT DPRD
0.00.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	2	19.999.990	0	1	7.514.000	1	5.776.000	1	5.776.000	1	5.776.000	1	5.776.000	1	5.776.000	1	5.776.000	50	28.88	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	2	20.449.890	0	1	7.485.000	0	0	0	0	1	7.163.000	1	7.163.000	1	7.163.000	1	7.163.000	50	35.03	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	882.970.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.00.01.2.03.02.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor, (Satuan: Dok - Kumulatif)	12	882.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	2.840.270.400	1	256.370.568	1	818.150.565	0	158.490.834	0	351.551.811	0	477.135.155	0	691.159.354	0	691.159.354	0	1.307.063.652	0	46.02	
0.00.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan, (Satuan: Stel - Kumulatif)	241	1.024.980.000	120	36.660.000	120	36.755.565	0	0	0	0	120	36.747.700	120	36.747.700	120	36.747.700	120	73.407.700	49.79	7.16	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti, (Satuan: Dok - Kumulatif)	12	1.815.290.400	2	219.710.568	6	781.395.000	1	158.490.834	3	351.551.811	4	440.387.455	6	654.411.654	6	654.411.654	6	874.122.222	50	48.15	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	12.488.150.304	1	1.663.734.653	1	3.499.973.000	0	429.985.837	0	959.449.263	0	2.156.197.149	0	3.239.085.771	0	3.239.085.771	0	6.269.663.528	0	50.20	
0.00.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	49	578.934.510	6.85	23.831.900	11	140.716.400	1.71	20.304.300	6.92	46.460.000	9.13	67.919.300	11	140.716.400	11	140.716.400	11	164.548.300	22.45	28.42	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0.00.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan, (Satuan: jenis - Kumulatif)	34	4.665.319.540	5	1.229.255.400	20	1.647.641.500	2	59.400.000	10	265.738.000	14	1.009.289.900	20	1.614.532.340	20	1.614.532.340	20	2.843.787.740	58.82	60.96	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	26	208.033.980	5.33	30.760.200	16	71.277.200	3	3.909.600	7	14.719.200	10	18.628.800	16	51.166.200	16	51.166.200	16	81.926.400	61.54	39.38	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	16000	2.268.420.000	867	172.450.000	8000	772.800.000	3727	164.450.000	6820	334.100.000	8000	515.750.000	8000	699.000.000	8000	699.000.000	8000	871.450.000	50	38.42	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	38	910.797.888	6.19	70.004.398	18	355.995.500	2.53	111.958.961	6.49	149.401.759	14.52	232.394.577	17.53	331.461.583	17.53	331.461.583	17.53	401.465.981	46.13	44.08	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	16	390.588.126	5.42	17.923.533	8	156.150.000	3	21.445.536	4.51	39.369.072	6.77	107.236.608	8	125.160.144	8	125.160.144	8	143.083.677	50	36.63	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	68	108.570.000	1.36	6.384.400	14	30.380.400	0.72	6.475.600	4.36	14.538.000	4.53	19.577.600	14	30.375.600	14	30.375.600	14	36.760.000	20.59	33.86	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.08.		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	8000	1.182.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi ke luar daerah, (Satuan: Dok - Kumulatif)	60	2.174.986.260	20	113.124.822	70	325.012.000	10	42.041.840	28	95.123.232	52	185.400.364	70	246.673.504	70	246.673.504	70	359.798.326	116.67	16.54	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (Satuan: BA)	4	7.674.469.680	1	600.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	7.82	
0.00.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang diadakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	5	5.300.000.000	1	509.525.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509.525.000	0	9.61	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	34	235.620.000	17	90.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.475.000	0	38.40	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas yg disediakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	10	108.970.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	4	2.029.879.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15						
0.00.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	3.736.540.500	1	506.454.839	1	1.543.496.312	0	149.244.835	0	497.409.273	0	904.670.194	0	1.488.063.001	0	1.488.063.001	0	2.878.537.787	0	77.04	
0.00.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telekomunikasi, air, listrik yang dibayarkan, (Satuan: LOK - Kumulatif)	15	1.426.540.500	2.09	173.574.995	4	703.826.312	0.99	147.294.835	1.98	301.459.279	2.97	471.452.494	4	670.125.348	4	670.125.348	4	843.700.343	26.67	59.14	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Keasaman dan Keterbacaan Kantor, (Satuan: Dok - Kumulatif)	36	2.310.000.000	4.50	332.879.844	18	839.670.000	0	1.950.000	4.50	195.949.994	9	433.217.700	18	817.937.653	18	817.937.653	18	1.150.817.497	50	49.82	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	8.981.802.926	1	2.243.313.095	1	3.263.423.300	0	524.982.406	0	1.075.283.989	0	2.179.042.673	0	3.102.001.132	0	3.102.001.132	0	6.975.552.127	0	77.66	
0.00.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara, (Satuan: Dok - Kumulatif)	38	1.412.533.260	6.51	103.104.135	19	398.936.000	3.16	78.214.144	8.33	166.103.288	12.59	257.437.432	16.85	378.691.576	16.85	378.691.576	16.85	481.795.711	44.34	34.11	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diurus perizinannya, (Satuan: Dok - Kumulatif)	56	1.283.970.600	0	19.089.269	28	197.437.000	10	113.632.472	21	138.239.944	28	161.796.216	28	183.212.088	28	183.212.088	28	202.301.357	50	15.76	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara, (Satuan: Dok - Kumulatif)	13	307.230.000	1.32	46.600.000	7	145.000.000	2	22.120.000	4	48.893.000	5	56.213.000	7	121.665.500	7	121.665.500	7	168.265.500	53.85	54.77	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, (Satuan: Dok - Kumulatif)	13	3.820.440.506	0	1.264.539.890	8	1.507.606.700	1.08	253.940.434	4.08	591.602.951	6.66	1.086.806.544	8	1.474.830.465	8	1.474.830.465	8	2.739.370.355	61.54	71.70	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rumah Jabatan yang Terpelihara, (Satuan: Dok - Kumulatif)	16	2.157.628.560	7	809.979.801	8	1.014.443.600	0.25	57.075.356	1	130.444.806	7	616.789.481	8	943.601.503	8	943.601.503	8	1.753.581.304	50	81.27	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.15.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, (Satuan: BA)	4	1.383.228.000	1	0	1	623.200.000	0	0	0	121.012.000	0	230.624.500	0	554.253.500	0	554.253.500	0	1.098.459.897	0	79.41	
0.00.01.2.15.02.		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang diadakan, (Satuan: Stel - Kumulatif)	450	1.157.541.000	0	200	525.500.000	0	0	50	121.012.000	100	230.624.500	200	516.749.500	200	516.749.500	200	516.749.500	44.44	44.64	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5				6				7				8		9		10		11			12
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
0.00.01.2.15.03.		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Jasa jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, (Satuan: Dok - Kumulatif)	100	225.687.000		0	50	97.700.000	0	0	0	0	0	0	32	37.504.000	32	37.504.000	32	37.504.000	32	16.62	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.16.		Layanan Administrasi DPRD	Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, (Satuan: BA)	4	9.193.832.400	1	330.328.004	1	1.555.024.500	0	359.618.948	0	651.087.996	0	1.130.201.544	0	1.499.417.592	0	1.499.417.592	0	2.826.905.252	0	30.75		
0.00.01.2.16.01.		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Peraturan perundang-undangan DPRD yang didokumentasikan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	50	138.657.750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.16.02.		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan hasil rapat-rapat Fraksi, (Satuan: Dok - Kumulatif)	168	2.689.336.962	21	154.641.670	84	698.515.900	21	149.759.844	42	335.785.088	63	511.858.332	84	683.868.776	84	683.868.776	84	838.510.446	50	31.18	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.16.03.		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD, (Satuan: Dok - Kumulatif)	76	5.278.328.848	2	175.686.334	38	856.508.600	5	209.859.104	10	315.302.908	15	618.343.212	36	815.548.816	36	815.548.816	36	991.235.150	47.37	18.78	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
0.00.01.2.16.04.		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara, (Satuan: Dok - Kumulatif)	12	1.087.508.840		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
4.02.	SEKRETARIAT DPRD																								
4.02.02.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	94	380.938.330.138	89.58	18.950.915.413	93	26.797.706.350	16.75	4.801.943.659	56.08	11.171.052.545	81.99	15.329.887.146	90	24.327.947.918	90	24.327.947.918	90	43.278.863.331	95.74	11.36	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN; BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI; BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN; BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
4.02.02.2.01.		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Berita Acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, (Satuan: BA)	4	22.450.605.064	1	1.645.030.783	1	5.055.555.050	0	359.788.915	0	1.012.732.460	0	1.377.957.628	0	4.140.079.046	0	4.140.079.046	0	7.289.907.880	0	32.47		
4.02.02.2.01.01.		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dibahas, (Satuan: Dok - Kumulatif)	12	3.933.180.504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4.02.02.2.01.02.		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda (Raperda) yang dibahas, (Satuan: Dok - Kumulatif)	24	12.157.391.376	8	1.041.991.006	12	3.551.397.150	0	284.231.166	7	842.671.878	10	933.367.613	12	3.107.724.498	12	3.107.724.498	12	4.149.715.504	50	34.13	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4.02.02.2.01.03.		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Pra Rancangan Perda yang dibahas, (Satuan: Dok - Kumulatif)	24	6.140.033.184	8	603.039.777	12	1.504.157.900	0	75.557.749	7	170.060.582	10	444.590.015	12	1.032.354.548	12	1.032.354.548	12	1.635.394.325	50	26.63	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
4.02.02.2.01.04.		Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang Disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	4	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.02.		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, (Satuan: BA)	4	14.280.893.600	1	223.796.441	1	1.261.417.800	0	81.172.519	0	323.657.052	0	695.946.881	0	1.010.403.150	0	1.010.403.150	0	1.480.574.979	0	10.37	
4.02.02.2.02.01.		pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang dibahas, (Satuan: Dok - Kumulatif)	6	4.789.444.000	0	80.172.300	2	547.113.600	0	0	0	3.232.000	2	214.040.930	2	388.982.698	2	388.982.698	2	469.154.998	33.33	9.80	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.02.02.		pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah KUPA dan PPAS Perubahan yang Dibahas, (Satuan: Dok - Kumulatif)	2	2.223.405.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.02.03.		Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang Dibahas, (Satuan: Dok - Kumulatif)	4	3.264.000.000	2	97.508.541	2	315.130.100	0	0	0	3.569.000	1	142.014.110	2	251.868.310	2	251.868.310	2	349.376.851	50	10.70	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.02.06.		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas, (Satuan: Dok - Kumulatif)	5	4.004.044.000		46.115.600	2	399.174.100	0	81.172.519	0	316.856.052	2	339.891.841	2	369.552.142	2	369.552.142	2	415.667.742	40	10.38	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, (Satuan: BA)	4	21.974.609.560	1	1.326.634.306	1	4.989.882.100	0	910.564.482	0	2.060.754.964	0	3.142.211.995	0	4.631.327.661	0	4.631.327.661	0	7.838.158.497	0	35.67	
4.02.02.2.03.01.		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum, (Satuan: Dok - Kumulatif)	24	3.794.107.520	3	349.835.956	12	1.074.931.200	3	201.999.173	6	485.222.456	9	719.305.471	12	1.009.804.548	12	1.009.804.548	12	1.359.640.504	50	35.84	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.02.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Infrastruktur, (Satuan: Dok - Kumulatif)	24	3.899.425.920	3	316.548.659	12	1.190.923.200	3	217.963.885	6	501.600.518	9	753.705.831	12	1.056.072.478	12	1.056.072.478	12	1.372.621.137	50	35.20	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.03.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat, (Satuan: Dok - Kumulatif)	24	3.871.151.520	3	347.964.289	12	1.152.412.800	3	235.888.891	6	510.137.424	9	800.894.597	12	1.102.048.277	12	1.102.048.277	12	1.450.012.566	50	37.46	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.04.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian, (Satuan: Dok - Kumulatif)	24	4.080.100.000	3	278.070.402	12	1.074.863.900	3	213.421.033	6	469.406.266	9	705.423.649	12	1.000.383.111	12	1.000.383.111	12	1.278.453.513	50	31.33	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.05.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	2.880.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15										
4.02.02.2.03.06.		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
4.02.02.2.03.07.		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran, (Satuan: Dok - Kumulatif)	24	3.149.824.600	3	34.215.000	12	496.751.000	3	41.291.500	6	94.388.300	9	162.882.447	12	463.019.247	12	463.019.247	12	497.234.247	50	15.79	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.04.		Peningkatan Kapasitas DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, (Satuan: BA)	4	17.081.789.100	1	1.284.435.552	1	7.835.654.300	0	1.248.449.083	0	3.374.625.430	0	4.889.901.930	0	6.973.440.611	0	6.973.440.611	0	12.722.014.362	0	74.48	
4.02.02.2.04.01.		Orientasi DPRD	Jumlah Peserta Orientasi DPRD, (Satuan: Dok - Kumulatif)	50	672.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
4.02.02.2.04.02.		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta, pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas, (Satuan: Dok - Kumulatif)	300	3.959.120.000	0	300	2.666.054.500	50	488.018.681	150	1.191.125.426	200	1.608.288.724	300	2.182.453.303	300	2.182.453.303	300	2.182.453.303	100	55.12	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
4.02.02.2.04.03.		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatankegiatan DPRD yang dipublikasikan, (Satuan: Kegiatan - Kumulatif)	792	6.351.743.410	75	838.157.052	396	3.373.098.200	24	464.595.102	218	1.567.305.404	384	2.338.680.206	396	3.301.569.308	396	3.301.569.308	396	4.139.726.360	50	65.17	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.04.04.		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan, (Satuan: Orang - Kumulatif)	50	4.323.225.900	3.75	199.500.000	18	1.414.000.000	3.88	213.500.000	8.89	503.000.000	13.90	768.500.000	18	1.126.250.000	18	1.126.250.000	18	1.325.750.000	36	30.67	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4.02.02.2.04.05.		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi, (Satuan: Dok - Kumulatif)	7	300.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
4.02.02.2.04.06.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, (Satuan: Dok - Kumulatif)	40	1.444.694.790	4	246.778.500	20	382.501.600	9	82.335.300	19	113.194.600	20	174.433.000	20	363.168.000	20	363.168.000	20	609.946.500	50	42.22	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.04.07.		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen yang Disusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	4	30.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4.02.02.2.05.		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, (Satuan: BA)	4	14.634.139.000	1	1.858.591.800	1	5.846.509.400	0	1.923.916.900	0	3.776.971.900	0	3.857.821.600	0	5.769.132.200	0	5.769.132.200	0	10.804.165.200	0	73.83	
4.02.02.2.05.02.		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen yang Tersusun, (Satuan: Dok - Kumulatif)	1	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
4.02.02.2.05.03.		Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	300	14.494.139.000	50	1.858.591.800	150	5.846.509.400	50	1.923.916.900	100	3.776.971.900	100	3.857.821.600	150	5.769.132.200	150	5.769.132.200	150	7.627.724.000	50	52.63	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.06.		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. (Satuan: BA)	4	1.273.331.652	1	82.431.668	1	255.214.400	0	12.362.333	0	77.726.166	0	227.041.336	0	250.825.669	0	250.825.669	0	494.188.246	0	38.81	
4.02.02.2.06.01.		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Penyusunan Kode Etik. (Satuan: Dok - Kumulatif)	1	268.508.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.06.02.		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Badan Kehormatan DPR. (Satuan: Dok - Kumulatif)	24	1.004.823.652	3	82.431.668	12	255.214.400	3	12.362.333	6	77.726.166	9	227.041.336	12	250.825.669	12	250.825.669	12	333.257.337	50	33.17	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.07.		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah. (Satuan: BA)	4	800.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.02.02.2.07.02.		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan yang Dipublikasikan. (Satuan: Dok - Kumulatif)	40	800.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.08.		Fasilitasi Tugas DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. (Satuan: BA)	4	26.945.087.600	1	370.731.356	1	1.553.473.300	0	265.689.427	0	544.584.573	0	1.139.005.776	0	1.552.739.581	0	1.552.739.581	0	2.649.854.167	0	9.83	
4.02.02.2.08.01.		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan hasil kunjungan kerja DPRD ke luar daerah. (Satuan: Dok - Kumulatif)	128	25.685.347.600	21	370.731.356	64	1.553.473.300	21	265.689.427	43	544.584.573	64	1.139.005.776	64	1.552.739.581	64	1.552.739.581	64	1.923.470.937	50	7.49	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.08.02.		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan yang Tersusun. (Satuan: Dok - Kumulatif)	12	679.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
Rata-rata capaian kinerja (%)										14,43	20,26	32,36	44,58	53,20	66,54	71,01	95,21							
Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya* :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya* :																								

Sumber, 31 Desember 2022
Sekretaris DPRD,

IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660420 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN SUB KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD
Periode: Sampai dengan bulan Juni 2023

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	0.00.01.2. 01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.387.000		16.758.000	71.66	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kumulatif)	2 Dokumen					
2	0.00.01.2. 01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.162.400		4.850.400	24.06	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kumulatif)	2 Dokumen					
3	0.00.01.2. 01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	435.605.600	35.850.104	208.440.174	47.85	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kumulatif)	3 Laporan		2	66.67		
4	0.00.01.2. 02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.667.576.180	757.334.844	2.516.052.361	53.90	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Non Kumulatif)	30 Orang/Bulan	30	30	100		
5	0.00.01.2. 02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.517.500		7.517.500	100	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kumulatif)	1 Laporan		1	100		
6	0.00.01.2. 02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.336.500				RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kumulatif)	1 Laporan					
7	0.00.01.2. 05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.363.095				WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Kumulatif)	1 Paket					
8	0.00.01.2. 05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	776.020,800	57.632.050	251.165.500	32.37	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kumulatif)	10 Orang		5	50		
9	0.00.01.2. 06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.442.900	6.521.100	38.511.200	47.29	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	11 Paket	1	6	54.55		
10	0.00.01.2. 06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.017.000		60.000.000	9.23	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	20 Paket		1	5		
11	0.00.01.2. 06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.267.800	1.283.400	7.700.400	30.48	WIWIN WINARTI, S.IP.	

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Kumulatif)	2 Paket	1	1	50		
12	0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	672.000.000	68.500.000	354.750.000	52.79	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	8000 Paket	1370	6455	80.69		
13	0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	341.256.400	3.667.841	125.397.421	36.75	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Kumulatif)	20 Paket		8	40		
14	0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.885.100	2.850.000	17.100.000	15.42	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Kumulatif)	8 Dokumen	1	2	25		
15	0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	62.298.900	2.165.400	31.661.400	50.82	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Kumulatif)	38 Paket	1	19	50		
16	0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.291.200	41.405.430	152.077.888	45.09	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kumulatif)	30 Laporan	5	25	83.33		
17	0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.397.500.000		1.349.800.000	96.59	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Kumulatif)	5 Unit		5	100		
18	0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	633.725.000	63.877.622	341.255.376	53.85	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kumulatif)	4 Laporan		2	50		
19	0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.253.784.000	103.620.000	416.400.000	33.21	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	18 Laporan	5	9	50		
20	0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	395.940.000	32.817.560	193.130.360	48.78	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kumulatif)	19 Unit	1	10	52.63		
21	0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.346.000	4.210.812	135.045.172	76.15	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kumulatif)	28 Unit	3	13	46.43		
22	0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.150.000	5.000.000	41.645.000	31.51	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kumulatif)	7 Unit	1	3	42.86		
23	0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.242.569.400	66.919.536	829.697.216	66.77	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kumulatif)	8 Unit		6	75		

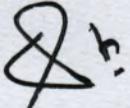
No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	0.00.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	794.266.000	94.738.768	192.396.608	24.22	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kumulatif)	8 Unit	2	2	25		
25	0.00.01.2.15.01.	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	39.208.037.400	4.580.846.281	23.885.528.946	60.92	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Non Kumulatif)	50 Orang/Bulan	50	50	100		
26	0.00.01.2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	456.500.000		115.000.000	25.19	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Kumulatif)	6 Paket		1	16.67		
27	0.00.01.2.15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	97.700.000				WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Kumulatif)	50 Orang					
28	0.00.01.2.16.02.	Fasilitasi Fraksi DPRD	657.438.000	54.607.092	327.407.552	49.80	RAMDANI, S.T.	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Kumulatif)	84 Laporan	7	42	50		
29	0.00.01.2.16.03.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.162.600	63.381.080	331.237.180	41.50	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Kumulatif)	38 Laporan	1	4	10.53		
30	4.02.02.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Perda	2.615.445.000	20.182.248	680.278.469	26.01	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kumulatif)	12 Dokumen		6	50		
31	4.02.02.2.01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.147.212.900	43.459.412	281.242.815	24.52	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Kumulatif)	12 Dokumen		6	50		
32	4.02.02.2.02.01.	pembahasan KUA dan PPAS	379.496.200	3.488.512	19.475.072	5.13	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumla Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Kumulatif)	2 Dokumen					
33	4.02.02.2.02.03.	Pembahasan APBD	330.748.900	3.488.512	19.475.072	5.89	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Kumulatif)	2 Dokumen					
34	4.02.02.2.02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	368.054.200	76.520.912	98.027.972	26.63	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Kumulatif)	2 Dokumen	1	1	50		
35	4.02.02.2.03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.193.638.100	54.443.512	516.652.753	43.28	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kumulatif)	12 Laporan	1	5	41.67		
36	4.02.02.2.03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.170.735.600	73.158.812	499.424.840	42.66	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Kumulatif)	12 Laporan	1	5	41.67		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	4.02.02.2.03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.142.199.300	69.016.012	513.834.322	44.99	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kumulatif)	12 Laporan	1	5	41.67		
38	4.02.02.2.03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.073.770.700	72.877.712	481.269.887	44.82	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Kumulatif)	12 Laporan	1	5	41.67		
39	4.02.02.2.03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	213.317.700		20.540.100	9.63	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Kumulatif)	12 Dokumen		2	16.67		
40	4.02.02.2.03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	431.042.600	30.848.600	359.007.003	83.29	OJI SAROJI, S.T., M.A.P..	
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Kumulatif)	1 Dokumen		1	100		
41	4.02.02.2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	2.337.665.000		927.829.002	39.69	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Kumulatif)	300 Dokumen		200	66.67		
42	4.02.02.2.04.03.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.408.031.800	337.582.062	1.677.591.818	49.22	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Kumulatif)	396 Dokumen	54	328	82.83		
43	4.02.02.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.314.000.000	93.500.000	561.000.000	42.69	WIWIN WINARTI, S.IP.	
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Kumulatif)	25 Orang	1	15	60		
44	4.02.02.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	305.853.600	21.629.000	118.050.000	38.60	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Kumulatif)	20 Dokumen	1	8	40		
45	4.02.02.2.04.07.	Penyusunan Program Kerja DPRD	26.017.800	755.100	10.864.600	41.76	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Kumulatif)	1 Dokumen		1	100		
46	4.02.02.2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	109.017.100	1.800.300	32.913.400	30.19	Dra. PUTI AMANAH SARI	
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Kumulatif)	1 Dokumen		1	100		
47	4.02.02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	4.310.928.100	1.838.467.224	3.877.424.344	89.94	Dra. PUTI AMANAH SARI	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Kumulatif)	150 Dokumen	50	100	66.67		
48	4.02.02.2.06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	279.090.100	25.302.312	124.272.110	44.53	HARYANTO, S.H..	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Kumulatif)	12 Laporan	2	5	41.67		
49	4.02.02.2.08.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	824.692.300	69.674.512	287.508.409	34.86	ANTO SUGIANTO, SE.	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Kumulatif)	12 Dokumen	1	6	50		

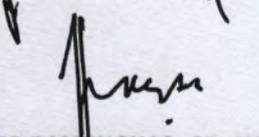
No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
50	4.02.02.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.296.335.000	42.565.854	476.156.849	36.73	HANDI EKO PRASETYO, S.Kom, MM.	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Kumulatif)	24 Dokumen	3	7	29.17		

Jumlah Serapan Anggaran (BL) Bulan ini : **Rp. 8.925.989.528,00**

Yang memverifikasi,


DWI KUSUMAYANTI, S.F.M., M.K.M
 NIP. 19710118 199503 2 002

Cirebon, 30 Juni 2023
 Sekretaris DPRD


ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650909 199303 1 006

Catatan Hasil Evaluasi : _____



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN PROGRAM
SEKRETARIAT DPRD
Periode: Sampai dengan bulan Juni 2023

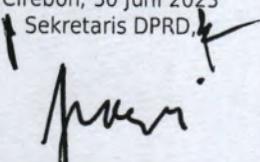
No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.499.546.775	6.047.228.920	31.950.525.654	57.57 ✓	Hj. NISA AFIDAH, SH.; WAWAN SISWANDAR, SE, M.Si.	
		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (Non Kumulatif)	96 Prosen	78.79	78.79	82.07 ✓		
		Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (Non Kumulatif)	96 Prosen	53.79	53.79	56.03 ✓		
		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen					
		Prosentase Pegawai yang hadir sesuai cengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan (Non Kumulatif)	96 Prosen	14.29	14.29	14.89		
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD (Non Kumulatif)	96 Prosen	94.44	94.44	98.38		
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif (Non Kumulatif)	100 Prosen	60.33	60.33	60.33		
		Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD (Non Kumulatif)	100 Prosen		0	0		
2	4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.277.292.000	2.878.760.608	11.582.838.837	47.71 ✓	Dr. NANANG RUHYANA, SKM., M.H.; Drs. RADEN CHAIDIR SUSILANINGRAT; Hj. NISA AFIDAH, SH.; WAWAN SISWANDAR, SE, M.Si.	
		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen	22.67	22.67	24.38		

Jumlah Serapan Anggaran (BL) Bulan ini : **Rp. 8.925.989.528,00**

Yang memverifikasi,


DWI KUSUMAYANTI, S.Ic.M., M.K.M.
NIP. 19710118 199503 2 002

Cirebon, 30 Juni 2023
Sekretaris DPRD,


ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

Catatan Hasil Evaluasi : _____



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD (IKK/IKU)
SEKRETARIAT DPRD
Periode: Sampai dengan bulan Juni 2023

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4.1.01.	Meningkatnya fasilitas fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	24.277.292.000	2.878.760.608	11.582.838.837	47.71	
		(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu (Non Kumulatif)	93 Prosen	5.000	5.000	5.38	
2	4.1.02.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	55.499.546.775	6.047.228.920	31.950.525.654	57.57	
		(IKK/IKU)-Nilai LAKIP Sekretariat DPRD (Non Kumulatif)	64.50 Poin	70.000	70.000	108.53	

Jumlah Serapan Anggaran (BL) Bulan ini : **Rp. 8.925.989.528,00**

Telah diverifikasi

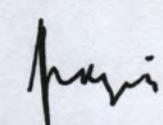
Pada tanggal: ____/____/2023

Nomor BA : 057/____/VI-PDE/2023

a.n Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon
Verifikator,


DWI, KUSUMAYANTI, S.K.M., M.K.M.
NIP. 19710118 199503 2 002

Cirebon, 30 Juni 2023
Sekretaris DPRD,


ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

Catatan Evaluasi:

Faktor Pendorong Keberhasilan:

Faktor Penghambat Pencapaian:

Tindak Lanjut yang diperlukan:



**CAPAIAN IKU/IKK
SEKRETARIAT DPRD
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2023**

No	URAIAN	JUMLAH		
		TARGET	CAPAIAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	0,00 Prosen	5,00	100,00
2	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	0,00 Poin	70,00	100,00

Diverifikasi pada tanggal: 10/07/2023
Nomor Verifikasi: 057/29/VI-PDE/2023



**a.n BUPATI CIREBON
Sekretaris DPRD**

ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
Pembina Utama Muda
NIP 19650909 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Indikator dan target kinerja yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD 93 Prosen
2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD 64.50 Poin

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
0.00.	NON BIDANG URUSAN																							
0.00.01	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	96	107.580.577.239	96	6.264.070.364	96	5.721.268.900	33.10	902.140.559	78.79	2.203.498.417	0	0	0	0	78.79	2.203.498.417	96	14.262.565.381	100	13.26	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN; BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
			Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	96	45.440.296.928	96	3.102.001.132	96	4.139.771.400	20	1.843.551.928	53.79	2.741.714.356	0	0	0	0	53.79	2.741.714.356	96	10.317.266.483	100	22.71	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	94	273.533.925		0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD		Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	96	6.277.806.210	96	553.497.200	96	493.863.095	14.29	115.000.000	14.29	115.000.000	0	0	0	0	14.29	115.000.000	96	1.202.907.200	100	19.16	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
			Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	96	186.333.880.704	96	43.916.309.883	96	44.651.634.380	94.44	12.509.130.647	94.44	26.652.746.807	0	0	0	0	94.44	26.652.746.807	96	114.500.940.889	100	61.45	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN; SEKRETARIAT DPRD
			Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif, (Satuan: Prosen Non Kumulatif Meningkat)	100	3.505.830.697	100	425.872.388	100	449.459.600	60.13	106.439.662	60.33	215.957.674	0	0	0	0	60.33	215.957.674	100	986.504.362	100	28.14	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
			Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	786.816.580	100	51.736.400	100	43.549.400	0	15.757.000	0	21.608.400	0	0	0	0	0	21.608.400	100	122.062.679	100	15.51	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
0.00.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	739.903.242	1	0	1	479.155.000	0	114.679.162	0	230.048.574	0	0	0	0	0	230.048.574	0	1.079.792.541	0	145.94	
0.00.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	60.003.205		0	2	23.387.000	0	15.757.000	0	16.758.000	0	0	0	0	16.758.000	0	16.758.000	0	27.93	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	84.744.000		0	2	20.162.400	0	0	0	4.850.400	0	0	0	0	4.850.400	0	4.850.400	0	5.72	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	3	595.156.037		0	3	435.605.600	2	98.922.162	2	208.440.174	0	0	0	0	208.440.174	2	200.440.174	66.67	35.02	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	5.011.067.798	1	0	1	4.681.430.180	0	647.448.654	0	2.523.569.861	0	0	0	0	2.523.569.861	0	89.159.364.991	0	1779.25		
0.00.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/Bulan - Non Kumulatif)	30	4.979.544.000		0	30	4.667.576.180	30	639.931.154	30	2.516.052.361	0	0	0	0	2.516.052.361	30	2.516.052.361	100	50.53	SEKRETARIAT DPRD	
0.00.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	1	15.761.899		0	1	7.517.500	1	7.517.500	1	7.517.500	0	0	0	0	7.517.500	1	7.517.500	100	47.69	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	1	15.761.899		0	1	6.336.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	1.421.779.040	1	0	1	813.383.895	0	122.225.550	0	251.165.500	0	0	0	0	251.165.500	0	1.558.229.152	0	109.60		
0.00.01.2.05.02.		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	1	375.826.000		0	1	37.363.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, (Satuan: Orang - Kumulatif)	10	1.045.953.040		0	10	776.020.000	5	122.225.550	5	251.165.500	0	0	0	0	251.165.500	5	251.165.500	50	24.01	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
0.00.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	6.543.372.081	1	0	1	2.280.459.300	0	376.042.603	0	787.198.309	0	0	0	0	787.198.309	0	7.056.861.837	0	107.85		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
0.00.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	11	333.576.551	0	0	11	81.442.900	3	18.947.900	6	38.511.200	0	0	0	0	6	38.511.200	6	38.511.200	54,55	11,54	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	20	2.281.851.494	0	0	20	650.017.000	1	60.000.000	1	60.000.000	0	0	0	0	1	60.000.000	1	60.000.000	5	2,63	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	2	119.867.198	0	0	2	25.267.800	0	3.850.200	1	7.700.400	0	0	0	0	1	7.700.400	1	7.700.400	50	6,42	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	8000	1.307.042.000	0	0	8000	672.000.000	2705	167.250.000	6455	354.750.000	0	0	0	0	6455	354.750.000	6455	354.750.000	80,69	27,14	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	20	524.793.068	0	0	20	341.256.400	4	23.974.563	8	125.397.421	0	0	0	0	8	125.397.421	8	125.397.421	40	23,89	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	8	225.011.674	0	0	8	110.885.100	1	8.550.000	2	17.100.000	0	0	0	0	2	17.100.000	2	17.100.000	25	7,60	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	38	62.557.000	0	0	38	62.298.900	9	15.383.200	19	31.661.400	0	0	0	0	19	31.661.400	19	31.661.400	50	50,61	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	30	1.688.673.096	0	0	30	337.291.200	13	78.086.740	25	152.077.888	0	0	0	0	25	152.077.888	25	152.077.888	83,33	9,01	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (Satuan: BA)	4	2.650.000.000	1	0	1	1.397.500.000	0	1.349.800.000	0	1.349.800.000	0	0	0	0	0	1.349.800.000	0	1.949.800.000	0	73,58	
0.00.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan, (Satuan: Unit - Kumulatif)	5	2.650.000.000	0	0	5	1.397.500.000	5	1.349.800.000	5	1.349.800.000	0	0	0	0	5	1.349.800.000	5	1.349.800.000	100	50,94	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	2.152.959.050	1	0	1	1.887.509.000	0	167.176.040	0	757.655.376	0	0	0	0	0	757.655.376	0	3.636.193.163	0	168,89	
0.00.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	4	821.959.050	0	0	4	633.725.000	1	167.176.040	2	341.255.376	0	0	0	0	2	341.255.376	2	341.255.376	50	41,52	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	18	1.331.000.000	0	0	18	1.253.784.000	0	0	9	416.400.000	0	0	0	0	9	416.400.000	9	416.400.000	50	31,28	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	4.634.678.921	1	0	1	2.742.271.400	0	493.751.928	0	1.391.914.356	0	0	0	0	0	1.391.914.356	0	8.367.466.483	0	180,54	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
0.00.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. (Satuan: Unit - Kumulatif)	19	813.701.526	0	0	19	395.940.000	6	94.677.680	10	193.130.360	0	0	0	0	10	193.130.360	10	193.130.360	52.63	23.73	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. (Satuan: Unit - Kumulatif)	28	739.728.660	0	0	28	177.346.000	5	19.459.336	13	135.045.172	0	0	0	0	13	135.045.172	13	135.045.172	46.43	18.26	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. (Satuan: Unit - Kumulatif)	7	177.023.000	0	0	7	132.150.000	1	28.430.000	3	41.645.000	0	0	0	0	3	41.645.000	3	41.645.000	42.86	23.53	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. (Satuan: Unit - Kumulatif)	8	1.661.103.679	0	0	8	1.242.569.400	3	338.024.608	6	829.697.216	0	0	0	0	6	829.697.216	6	829.697.216	75	49.95	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. (Satuan: Unit - Kumulatif)	8	1.243.122.056	0	0	8	794.266.000	0	13.160.304	2	192.396.608	0	0	0	0	2	192.396.608	2	192.396.608	25	15.48	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.15.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. (Satuan: BA)	4	40.267.572.200	1	0	1	39.762.237.400	0	11.861.973.943	0	24.000.528.946	0	0	0	0	0	24.000.528.946	0	25.098.988.843	0	62.33	
0.00.01.2.15.01.		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD. (Satuan: Orang/Bulan - Non Kumulatif)	50	39.470.569.400	0	0	50	39.208.037.400	50	11.746.973.943	50	23.885.528.946	0	0	0	0	50	23.885.528.946	50	23.885.528.946	100	60.51	SEKRETARIAT DPRD
0.00.01.2.15.02.		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan. (Satuan: Paket - Kumulatif)	6	666.964.100	0	0	6	456.500.000	1	115.000.000	1	115.000.000	0	0	0	0	1	115.000.000	1	115.000.000	16.67	17.24	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.15.03.		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD. (Satuan: Orang - Kumulatif)	50	130.038.700	0	0	50	97.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.16.		Layanan Administrasi DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. (Satuan: BA)	4	4.590.187.899	1	0	1	1.455.600.600	0	358.921.916	0	658.644.732	0	0	0	0	0	658.644.732	0	3.485.549.984	0	75.93	
0.00.01.2.16.02.		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	84	1.549.217.716	0	0	84	657.438.000	21	160.656.576	42	327.407.552	0	0	0	0	42	327.407.552	42	327.407.552	50	21.13	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
0.00.01.2.16.03.		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	38	3.040.970.183	0	0	38	798.162.600	2	198.265.340	4	331.237.180	0	0	0	0	4	331.237.180	4	331.237.180	10.53	10.89	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.	SEKRETARIAT DPRD																							

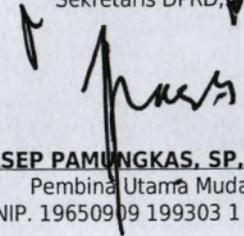
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		
4.02.02	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu. (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	94	380.938.330.138	90	24.327.947.918	93	24.277.292.000	22.67	5.526.498.982	22.67	11.582.838.837	0	0	0	0	22.67	11.582.838.837	90	54.861.702.168	95.74	14.40	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN; BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI; BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN; BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4.02.02.2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD. (Satuan: BA)	4	18.775.575.130	1	0	1	3.762.657.900	0	585.878.804	0	961.521.284	0	0	0	0	0	961.521.284	0	8.251.429.164	0	43.95	
4.02.02.2.01.01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	12	4.326.498.555	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.01.02		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	12	9.439.633.209	0	12	2.615.445.000	6	442.646.925	6	680.278.469	0	0	0	0	6	680.278.469	6	680.278.469	50	7.21	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4.02.02.2.01.03		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	12	4.767.443.366	0	12	1.147.212.900	6	143.231.879	6	281.242.815	0	0	0	0	6	281.242.815	6	281.242.815	50	5.90	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4.02.02.2.01.04		Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	242.000.000	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. (Satuan: BA)	4	11.808.030.960	1	0	1	1.078.299.300	0	28.720.608	0	136.978.116	0	0	0	0	0	136.978.116	0	1.617.553.095	0	13.70	
4.02.02.2.02.01		pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	3.718.862.400	0	2	379.496.200	0	9.373.536	0	19.475.072	0	0	0	0	0	19.475.072	0	19.475.072	0	0.52	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
4.02.02.2.02.02		pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	2.445.746.160	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.02.03		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	2.534.400.000	0	2	330.748.900	0	9.373.536	0	19.475.072	0	0	0	0	0	19.475.072	0	19.475.072	0	0.77	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
4.02.02.2.02.06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	3.109.022.400	0	2	368.054.200	0	9.973.536	1	98.027.972	0	0	0	0	1	98.027.972	1	98.027.972	50	3.15	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. (Satuan: BA)	4	19.291.216.176	1	0	1	5.224.704.000	0	1.054.495.860	0	2.390.728.905	0	0	0	0	2.390.728.905	0	10.228.887.402	0	53.02		
4.02.02.2.03.01		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	2.945.956.992	0	12	1.193.638.100	2	229.832.875	5	516.652.753	0	0	0	0	5	516.652.753	5	516.652.753	41.67	17.54	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
4.02.02.2.03.02.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	3.027.733.632		0	12	1.170.735.600	2	246.475.812	5	499.424.840	0	0	0	0	5	499.424.840	5	499.424.840	41.67	16.50	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.03.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	3.005.779.392		0	12	1.142.199.300	2	250.331.720	5	513.834.322	0	0	0	0	5	513.834.322	5	513.834.322	41.67	17.09	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.04.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	3.168.000.000		0	12	1.073.770.700	2	227.946.504	5	481.269.887	0	0	0	0	5	481.269.887	5	481.269.887	41.67	15.19	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.05.		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	3.168.000.000		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.06.		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	330.000.000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.07.		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	12	2.445.746.160		0	12	213.317.700	1	3.123.900	2	20.540.100	0	0	0	0	2	20.540.100	2	20.540.100	16.67	0.84	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.03.08.		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	1.200.000.000		0	1	431.042.600	0	96.785.049	1	359.007.003	0	0	0	0	1	359.007.003	1	359.007.003	100	29.92	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.04.		Peningkatan Kapasitas DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. (Satuan: BA)	4	13.718.818.180	1	0	1	7.391.568.200	0	1.509.845.398	0	3.295.335.420	0	0	0	0	0	3.295.335.420	0	16.017.349.782	0	116.75	
4.02.02.2.04.01.		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	50	739.200.000		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4.02.02.2.04.02.		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	300	4.355.032.000		0	300	2.337.665.000	150	593.848.802	200	927.829.002	0	0	0	0	200	927.829.002	200	927.829.002	66.67	21.30	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4.02.02.2.04.03.		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	396	3.737.059.711		0	396	3.408.031.800	143	559.984.596	328	1.677.591.818	0	0	0	0	328	1.677.591.818	328	1.677.591.818	82.83	44.89	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.04.04.		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli. (Satuan: Orang - Kumulatif)	25	2.491.001.590		0	25	1.314.000.000	6	280.500.000	15	561.000.000	0	0	0	0	15	561.000.000	15	561.000.000	60	22.52	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4.02.02.2.04.05.		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi. (Satuan: Orang - Kumulatif)	7	331.045.000		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4.02.02.2.04.06.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	1.832.419.379		0	20	305.853.600	6	67.859.100	8	118.050.000	0	0	0	0	8	118.050.000	8	118.050.000	40	6.44	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
4.02.02.2.04.07		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	233.060.500		0	1	26.017.800	0	7.652.900	1	10.864.600	0	0	0	0	1	10.864.600	1	10.864.600	100	4,66	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.05.		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, (Satuan: BA)	4	8.681.946.900	1	0	1	4.419.945.200	0	2.006.256.072	0	3.910.337.744	0	0	0	0	0	3.910.337.744	0	14.714.502.944	0	169,48	
4.02.02.2.05.02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	154.000.000		0	1	109.017.100	0	3.175.000	1	32.913.400	0	0	0	0	1	32.913.400	1	32.913.400	100	21,37	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.05.03		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	8.527.946.900		0	150	4.310.928.100	50	2.003.081.072	100	3.877.424.344	0	0	0	0	100	3.877.424.344	100	3.877.424.344	66,67	45,47	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, (Satuan: BA)	4	1.075.546.859	1	0	1	279.090.100	0	38.532.136	0	124.272.110	0	0	0	0	0	124.272.110	0	618.460.356	0	57,50	
4.02.02.2.06.01		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	295.358.800		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.06.02		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	780.188.059		0	12	279.090.100	2	38.532.136	5	124.272.110	0	0	0	0	5	124.272.110	5	124.272.110	41,67	15,93	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
4.02.02.2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah, (Satuan: BA)	4	880.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.02.02.2.07.02		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	40	880.000.000		0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.08.		Fasilitasi Tugas DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, (Satuan: BA)	4	12.166.547.600	1	0	1	2.121.027.300	0	302.770.104	0	763.665.258	0	0	0	0	0	763.665.258	0	3.413.519.425	0	28,06	
4.02.02.2.08.01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	64	8.130.833.600		0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.08.02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	746.900.000		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
4.02.02.2.08.03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	12	1.638.814.000		0	12	824.692.300	3	94.368.173	6	287.508.409	0	0	0	0	6	287.508.409	6	287.508.409	50	17,54	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.08.04		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	24	1.650.000.000		0	24	1.296.335.000	3	208.401.931	7	476.156.849	0	0	0	0	7	476.156.849	7	476.156.849	29,17	28,86	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI
Rata-rata capaian kinerja (%)										17,57	26,35	31,75	54,57	0,00	54,57	0,00	54,57							
Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	-	Rendah	-	Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya* :																								

Sumber, 30 Juni 2023
 Sekretaris DPRD,



ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650909 199303 1 006

LEMBAR REKONSILIASI BELANJA

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Bulan Juni Tahun 2023

URAIAN	BUD			SKPD			SELISIH		
	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini
SP2D Belanja Gaji & Tunjangan	21.063.400.182,00	5.338.181.125,00	26.401.581.307,00	21.063.400.182,00	5.338.181.125,00	26.401.581.307,00	0,00	0,00	0,00
STS Belanja Gaji & Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Gaji & Tunjangan	21.063.400.182,00	5.338.181.125,00	26.401.581.307,00	21.063.400.182,00	5.338.181.125,00	26.401.581.307,00	0,00	0,00	0,00
SP2D Belanja Langsung	2.844.423.200,00	258.780.000,00	3.103.203.200,00	2.844.423.200,00	258.780.000,00	3.103.203.200,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Langsung	2.844.423.200,00	258.780.000,00	3.103.203.200,00	2.844.423.200,00	258.780.000,00	3.103.203.200,00	0,00	0,00	0,00
SP2D UP dan GU	8.836.550.024,00	1.913.772.657,00	10.750.322.681,00	8.836.550.024,00	1.913.772.657,00	10.750.322.681,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Belanja UP/GU	8.750.322.681,00	1.490.974.203,00	10.241.296.884,00	8.750.322.681,00	1.490.974.203,00	10.241.296.884,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Koreksi Belanja & STS UP/GU	1.650.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja UP/GU	8.748.672.681,00	1.490.974.203,00	10.239.646.884,00	8.748.672.681,00	1.490.974.203,00	10.239.646.884,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Kas Belanja UP/GU	86.227.343,00	422.798.454,00	509.025.797,00	86.227.343,00	422.798.454,00	509.025.797,00	0,00	0,00	0,00
SP2D Tambahan Uang (TU)	1.968.190.000,00	2.017.795.000,00	3.985.985.000,00	1.968.190.000,00	2.017.795.000,00	3.985.985.000,00	0,00	0,00	0,00
SPJ Belanja Tambahan Uang (TU)	1.950.878.900,00	1.838.054.200,00	3.788.933.100,00	1.950.878.900,00	1.838.054.200,00	3.788.933.100,00	0,00	0,00	0,00
STS Pengembalian TU	17.311.100,00	0,00	17.311.100,00	17.311.100,00	0,00	17.311.100,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Kas Belanja TU	0,00	179.740.800,00	179.740.800,00	0,00	179.740.800,00	179.740.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REALISASI BELANJA	34.607.374.963,00	8.925.989.528,00	43.533.364.491,00	34.607.374.963,00	8.925.989.528,00	43.533.364.491,00	0,00	0,00	0,00
SISA KAS DARI BELANJA UP/GU dan TU	86.227.343,00	602.539.254,00	688.766.597,00	86.227.343,00	602.539.254,00	688.766.597,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	SKPD			CATATAN
	Sd Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd Bulan Ini	
PERHITUNGAN SALDO KAS DI BENDAHARA				
Saldo Tunai	0,00	0,00	0,00	
Saldo Bank	0,00	0,00	688.766.597,00	
PERHITUNGAN PAJAK (UP / GU / TU)				
Perimaan	381.177.500,00	172.908.024,00	554.085.524,00	
Penyetoran	381.177.500,00	172.908.024,00	554.085.524,00	
Saldo Pajak	0,00	0,00	0,00	

Sumber, 4 Juli 2023
Kepala Sub Bidang Belanja Daerah



(Handwritten Signature)

JOHAR MAKNUH, SAP.
NIP. 19711212 199412 1 001